

LAKIP 2022



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN BOYEN DIGOEL**

KATA PENGANTAR



dr. Viviana Maharani Pradotokoesoemo, MM

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Boven Digoel

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga dapat disusun dan diterbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah agar menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara lebih baik dan benar. Penyusunan LAKIP mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel Tahun 2022.

Sejalan dengan penerapan manajemen berbasis kinerja, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerja instansinya sebagai wujud akuntabilitas kepada para *stakeholders*. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2022, terdiri atas kinerja program yang diukur dengan indikator hasil (*outcome*) dan kinerja kegiatan yang diukur dengan indikator keluaran (*output*).

Untuk tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang, baik capaian kinerja yang memenuhi target program maupun yang tidak memenuhi target, dianalisis dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja pada masa mendatang. Pencapaian Kinerja yang diperoleh pada tahun 2022 tidak terlepas dari dukungan seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel serta adanya dukungan dari pemerintah daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota dan Mitra Kerja terkait.

Penghargaan yang setinggi tingginya dan ucapan terimakasih kepada seluruh staf DPPKB yang telah menunjukkan dedikasinya yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab masing masing . Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati usaha kita bersama dan usaha yang telah di kerjakan bermanfaat bagi pegawai dilingkungan DPPKB , masyarakat dan Bangsa Indonesia

Akhir kata melalui laporan ini diharapkan pencapaian kinerja DPPKB Kabupaten Boven Digoel dapat lebih di tingkatkan pada masa mendatang, baik perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel.

Tanah Merah, 10 Januari 2022
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten
Boven Digoel,

dr. Viviana Maharani Pradotokoesoemo, MM
NIP.196407091995032001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel nomor 5 Tahun 2016 tentang Perkembangan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, diamanatkan untuk dapat mencapai sasaran peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk itu Visi, Misi, dan juga rencana strategis disusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) agar dapat menjadi acuan pelaksanaan program.

Sasaran program dan sasaran kegiatan yang diamanahkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Boven Digoel dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis DPPKB sebagaimana yang tercantum dalam rencana strategis (RENSTRA) DPPKB tahun 2021 - 2025 dievaluasi dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang dibuat tiap tahun. Indikator – indikator sasaran kinerja yang diukur dalam dokumen LAKIP berdasarkan hasil survei maupun laporan tahunan kemudian dianalisis untuk dapat menentukan arah strategis pelaksanaan program selanjutnya.

Dalam capaian target Kinerja Kabupaten Tahun 2022 adalah 5 indikator yang berhasil mencapai $\geq 100\%$, 7 indikator yang mencapai persentase 80% - $\leq 99\%$ dan 2 indikator yang capaiannya dibawah 80%. Rincian capaian indikator tersebut tertera di bawah ini.

1. Capaian kinerja DPPKB Boven Digoel tahun 2022 yang masuk dalam kategori BAIK {HIJAU} dengan rentan pencapaian $\geq 100\%$ adalah:
 - a. Bidang Pengendalian Penduduk
 - Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
 - Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Kependudukan
 - Penguatan Kerjama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal

- Membentuk Rumah Data kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
- Pengolahan dan Pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB

b. Bidang Keluarga Berencana

- Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
- Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
- Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
- Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringan
- Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

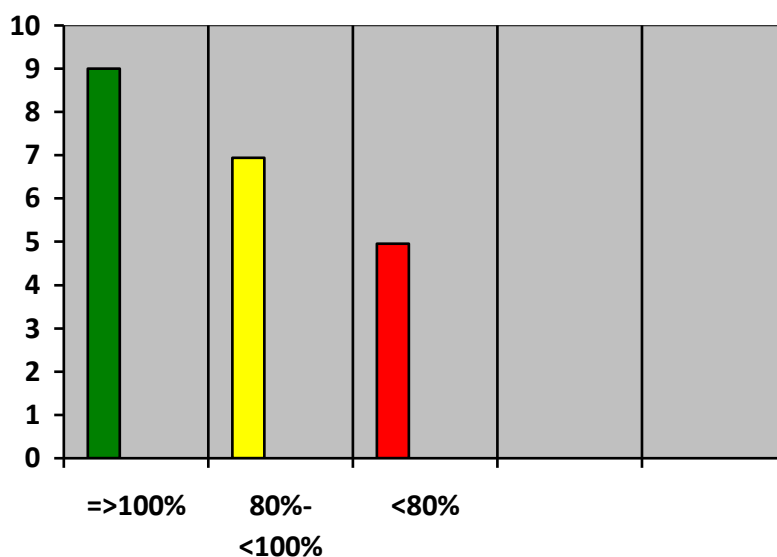
c. Bidang Keluarga Sejahtera

- Pembentukan Kelompok Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan (Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)
- Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
- Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - a. Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui Dana DAU & DAK Fisik maupun Non Fisik.
 - b. Jumlah ketersediaan Peraturan Daerah Kampung KB.
 - c. Jumlah ketersediaan data dan informasi yg akurat dan tepat waktu
 - d. Jumlah Laporan keuangan dan pengelolaan BMN yg dapat diselesaikan tepat waktu, akuntabel, kredibel, dan memenuhi standar kepatutan
 - e. Persentase Pembentukan Kampung KB
 - f. Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-19 th)
 - g. Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49th
 - h. Persentase tingkat ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi
 - i. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)
 - j. Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
 - k. Jumlah Alat kontrasepsi yang tersedia di Faskes
 - l. Jumlah Peserta KB Aktif

2. Capaian Kinerja DPPKB Boven Digoel tahun 2021 yang masuk dalam kategori KURANG (MERAH) dengan rentang pencapaian lebih rendah 80% adalah:
 - a. Jumlah stunting masih Tinggi
 - b. Persentase Perangkat Daerah (Dinas / badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB

Capaian Kinerja Berdasarkan Persentase



Secara total realisasi anggaran DPPKB Boven Digoel sebesar 88,96 persen yaitu dapat merealisasikan sebesar Rp 9.078.357.680,- dari Pagu Anggaran Rp 10.205.422.291,-.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2022 sebagai upaya untuk meningkatkan capaian yang belum sesuai dengan target yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan revitalisasi penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan obat dan alat kontrasepsi modern yang tepat sasaran,
2. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program Bangga Kencana difokuskan pada wilayah-wilayah yang pencapaian peserta aktifnya rendah, ASFR dan angka tingkat kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di Kampung
3. Mengintensifkan advokasi & pelayanan KB yang terintegrasi dengan OPD-KB & Dinas teknis terkait.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI	ix
SISTIMATIKA PENULISAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Sumber Daya	11
1.3. Dasar Hukum.....	12
1.4. Harapan & Tantangan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
2.1. Rencana Strategis.....	24
2.2. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah ...	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	37
3.2. Upaya Program kegiatan & Hasil Pencapaian....	39
BAB IV PENUTUP.....	55
4.1. Pengukuran Kinerja	56
4.2. Upaya Pemecahan Masalah.....	57
LAMPIRAN	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi DPPKB.....	7
Gambar 1.2. Peta Kabupaten Boven Digoel	15
Gambar 1.3. Tren Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi Papua	16
Gambar 1.4. Laju Pertumbuhan Penduduk Papua Hasil SPI 1980 – 2010.....	16
Gambar 1.5. Sandingan Tingkat Pengetahuan KB Modern dan Kesertaan Cara KB Modern.....	17
Gambar 1.6. Sandingan pemakain KB cara Modern dan Unmet.....	18
Gambar 1.7. CPR Wanita menurut SUPAS 201.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Deskripsi Nama Jabatan Dalam Struktur OPD DPPKB.....	7
Tabel 1.2. BMN DPPKB.....	9
Tabel 1.3. Profil Pegawai DPPKB Boven Digoel.....	11
Tabel 2.1. Capaian 2020 dan Target Pencapaian 2021 Berdasarkan Kontrak Kerja Kepala Perangkat Daerah (KKK).....	35
Tabel 3.1. Indikator Kinerja Prioritas OPD DPPKB Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021.....	38

SISTIMATIKA PELAPORAN

Dalam laporan Kinerja Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Tahun 2022 ini akan fokus menjelaskan pencapaian kinerja Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama tahun 2022 dengan berbagai keberhasilan, hambatan dan tantangannya. **Sistematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut:**

Pendahuluan

Berisi penjelasan secara ringkas mengenai latar belakang; tugas, fungsi, dan wewenang; penerima manfaat; kedudukan dan fungsi; struktur organisasi dan dasar hukum;

Perencanaan Kinerja

Berisi penjelasan rencana strategis DPPKB 2021-2025; visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, perjanjian kinerja, monitoring dan evaluasi pencapaian rencana strategis tahun 2022.

Akuntabilitas Kinerja

Berisi penjelasan pencapaian kinerja tahun 2022 beserta realisasi anggaran serta perbandingan dengan pencapaian kinerja pada akhir tahun renstra.

Penutup

Berisi kesimpulan atas Laporan Kinerja DPPKB tahun 2022.

Lampiran

Berisi data dukung atas penjelasan dalam laporan ini.

1.1. LATAR BELAKANG

Wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Boven Digoel, diawali dengan menyusun Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang kemudian akan dievaluasi atau dinilai melalui Laporan



Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*). Berdasarkan Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan pengelolaan program Kependudukan sebagai satu kesatuan dengan program KB dalam satu organisasi.

Pelaksanaan pengelolaan Program BANGGA KENCANA erat kaitannya dengan upaya terhadap peningkatan angka kesertaan ber-KB dan penurunan angka kelahiran total. Untuk mencapai tujuan program BANGGA KENCANA, peran kelembagaan sangatlah menentukan, apalagi di era otonomi daerah dimana keberadaan OPD-KB (Organisasi Perangkat Daerah-Keluarga Berencana) sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Begitu pula dengan sarana dan prasarana serta komponen-komponen pendukung seperti jumlah petugas lapangan yang sedikit. APBD yang belum memadai serta kebutuhan ketersediaan data yang tepat waktu dan akurat.

Sebagai salah satu Program Pembangunan Nasional, Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga,

mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan Manusia Indonesia Sejahtera disamping pendidikan dan kesehatan. Undang- undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan pencapaian sasaran peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk mencapai kondisi tersebut RPJMN 2015-2019 diarahkan pada Pelaksanaan Pembangunan yang berwawasan kependudukan, maka DPPKB turut memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk serta mengarahkan persebaran penduduk.

Pembangunan Kependudukan juga merupakan upaya untuk mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA) dalam rangka mewujudkan Norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, untuk mendukung terwujudnya **Visi DPPKB Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025. yaitu MENJADI “ Lembaga Yang Handal Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang Serta Keluarga Berkualitas menuju Boven Digoel Bersatu , Sejahtera dan Mampu berdaya saing “.**

Untuk mengukur tingkat pencapaian Kinerja Program KB tahun 2022 dalam lingkup DPPKB Kabupaten Boven Digoel diperlukan adanya laporan Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam memberikan gambaran mengenai keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Boven Digoel dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai sebagai mana tertuang dalam Visi tersebut maka disusunlah **Misi** sebagai berikut:

- a. Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan;

- b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- c. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga dan Ketahanan Keluarga;
- d. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten;
- e. Mengembangkan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) serta jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- f. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem LAKIP bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan strategis dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut , sistem siklus LAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinsikan visi, misi dan tujuan/ sasaran Strategi DPPKB Kabupaten Boven Digoel .

Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan / sasaran Strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja DPPKB Kabupaten Boven Digoel. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/ kegiatan , capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama :

Pertama, laporan Akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi DPPKB Kabupaten Boven Digoel untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD dan Masyarakat).

Kedua, laporan Akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja DPPKB Kabupaten Boven Digoel sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap Instansi pemerintah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel adalah salah satu komponen dalam infrastruktur kelembagaan Perwakilan BKKBN Provinsi, dan tanggung jawabnya diarahkan sepenuhnya untuk memperlancar seluruh ruang lingkup tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kedudukan dan Peran

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel disingkat DPPKB Kabupaten berada dibawah Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel. DPPKB Kabupaten Boven Digoel dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kedudukan DPPKB Kabupaten Boven Digoel merupakan kepanjangan tangan dari BKKBN Pusat dan, Perwakilan BKKBN Provinsi, untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan

- kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
 - d. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
 - e. Pelaksanaan tugas administrasi umum;
 - f. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;

3. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor: 66 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Pejabaran Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten, dimana DPPKB Kabupaten Boven Digoel, termasuk dalam OPD DPPKB Kabupaten yang ber Tipe B, dengan Susunan Organisasi terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang 7 (tujuh) seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

a. *Sekretariat, membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :*

- 1) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten.

b. *Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan, membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu:*

- 1) Seksi Advokasi dan Pergerakan;
- 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PPLKB dan Kader KB

3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas penyiapan, pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk.

c. Bidang Keluarga Berencana membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :

- 1) Seksi Jaminan Pelayanan KB dan distribusi Alkon ;
- 2) Seksi Pembinaan Keluarga Berencana .

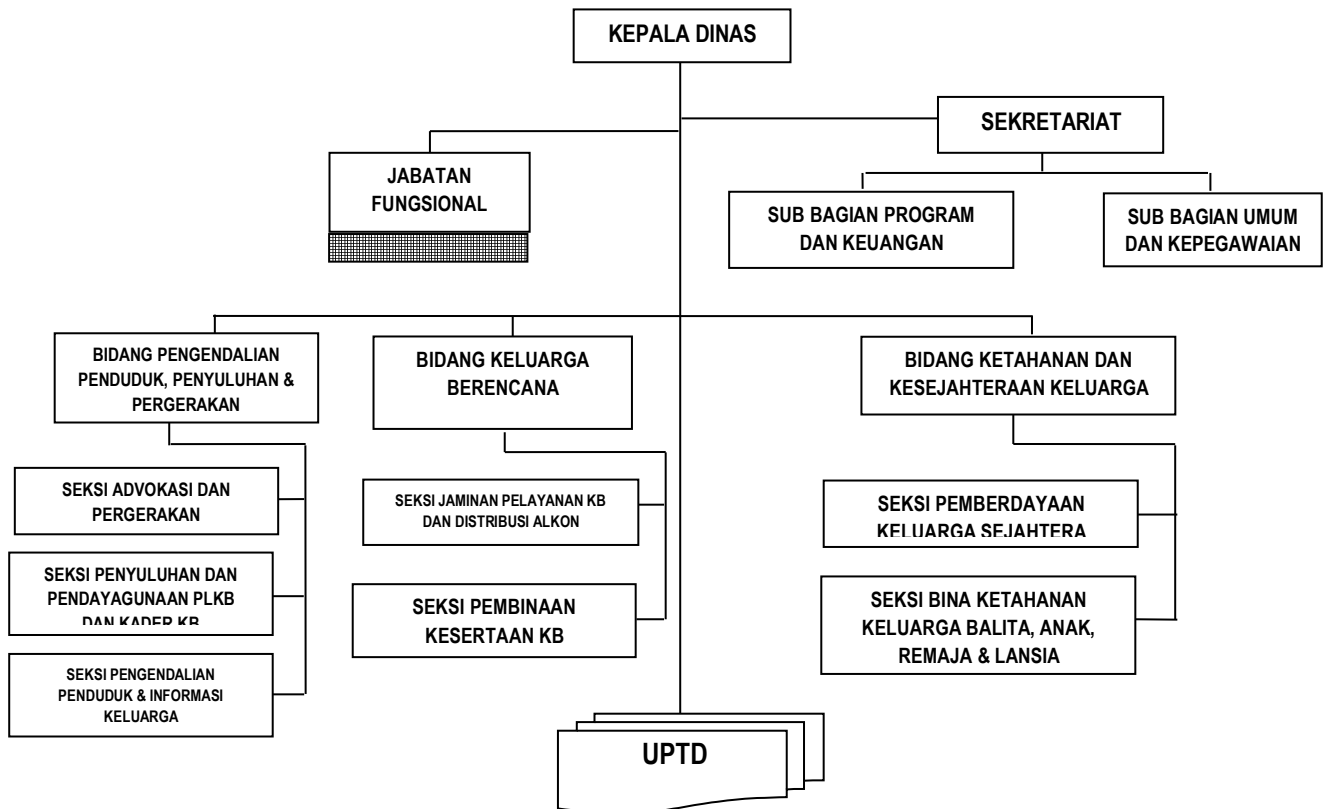
Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana.

d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :

- 1) Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- 2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lansia.

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Gambar: 1.1.
Struktur Organisasi DPPKB
Kabupaten Boven Digoel



Tabel. 1.1
Deskripsi nama jabatan dalam struktur OPD DPPKB

NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL
Dr. Viviana Maharani Pradotokoesoemo, MM NIP. 19640917 199503 2 001	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda (IV/c)
Maria R Tabiarob, SE NIP. 19791912 200605 2 001	Sekretaris	Penata TK. I (III/d)
Maria Elisabeth Resubun,SKM NIP. 19841007 201112 2 001	Kasubbag Program & Keuangan	Penata (III/c)

Anastasia Diana, SKM NIP. 19800404 200909 2 002	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Penata (III/c)
-	Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan	-
Maria Goretti Yefin, SKM NIP. 19800723 200801 2 017	Kasie Advokasi dan Pergerakan	Penata Tk.I (III/d)
-	Kasie Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB	-
Raimon Maniani, Amd.Kep NIP. 19710523 199602 1 001	Kasie Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga Informasi Keluarga	Penata (III/c)
Maria Goretti Kakerok, AMK NIP. 19720224 199301 2 002	Kabid Keluarga Berencana	Penata Tk.I (III/d)
Ekasia Iambertus, s.Kep.Ners NIP. 19830517 201112 2 001	Kasie Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat Kontrasepsi	Penata (III/c)
Anthoneta Warip, Amd.Keb NIP. 19680817 198902 2 002	Kasie Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB	Penata Tk.I (III/d)
Katarina Udam, S. Kep,Ns NIP. 19800111 200605 2 001	Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penata (III/c)
-	Kasie Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	-
Nelvianti Pilo, Amd Gz NIP. 19781114 200502 2 004	Kasie Bina Ketahanan Keluarga, Balita Anak, Remaja dan Lansia	Penata Tk.I (III/d)

4. Keberadaan BMN (Barang Milik Negara)

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Objek Barang Milik Negara antara lain: tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, yang digunakan sebagai sarana maupun prasarana pendukung operasional. Secara rinci BMN DPPKB Kabupaten Boven Digoel meliputi:

Tabel. 1.2
BMN DPPKB

N0	JENIS BARANG/NAMA BARANG	JUMLAH
1	AC	6
2	TV	3
3	Kulkas	1
4	Piring Lima Lusin	5
5	Gelas Kaca	5
6	Mangkok	4
7	Baki	4
8	Ketel listrik	2
9	Kain gordien	15
10	Taplak Meja	5
11	Dispenser	1
12	Komputer/PC	28
13	Laptop	4
14	Note Book	4
15	LCD Proyektor/Infocus	5
16	Printer Canon	4
17	Printer Lacer Jet	2
18	Stafol	10
19	Meja Kerja 1 Biro	4
20	Meja Kerja 1/2 Biro	32
21	Kursi Hidrolik	3
22	Kursi Citos	21
23	Kursi Sofa	1
24	Lemari Arsip	5
25	Obgyn Bed	10
26	Implan Removal KIT	59
27	Implan IUD KIT	47
28	Lemari Alkon	18

N0	JENIS BARANG/NAMA BARANG	JUMLAH
29	Mobil Mupen	3
30	Sepeda Motor / KB	22
31	Brangkas	1
32	Camera	1
33	Genre KIT	1
34	Kie KIT	30
35	BKB KIT	69
36	PPKBD Sub PPKBD	20
37	Balai penyuluh KB	6
38	Rumah PLKB	1
39	Gudang Alkon	1
40	Publik Address	2
41	Timbangan Bayi	1
42	Tempat Tidur	1
43	White Board	1
44	Rak	1
45	Kipas Angin	3
46	Exausfand	3
47	Kursi Ketua (Hidrolik	2
48	Meja Kerja	2
49	Meja Rapat	1
50	Kursi Rapat	6
51	Sitje	1
52	Timbangan Dewasa	1
53	V-Sat	1
54	Mesin Hitung	36
55	Raperda Kampung KB	1
56	Kompore Gas 2 Tungku	1
57	Tabung Gas	1
58	Sumur Bor	1
59	Teralis Jendela	10
60	Pemasangan Listrik	1

Sumber: Bendahara Barang DPPKB

1.2. Sumber Daya

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel merupakan instansi daerah yang juga masih berkoordinasi kepada BKKBN Provinsi dan Pusat, dalam melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia secara profesional dimana fungsi-fungsi SDM mulai dari perencanaan, saling terintegrasi dengan tata aturan Pemerintah Pusat. Dalam proses rekrutmen Pegawai dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Boven Digoel, sehingga dalam pelaksanaannya lebih transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi, Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah SDM yang aktif di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai 50 orang.

Berikut adalah profil pegawai DPPKB:

Tabel: 1.3.
Profil Pegawai DPPKB Boven Digoel

NO	Pendidikan	Jumlah
1	Megister (S2)	2 Orang
2	Sarjana (S1/D4)	28 Orang
3	Diploma (D3)	11 Orang
4	SMA	15 Orang
	Total ASN	56 Orang

NO	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	3 Orang
2	Golongan III	25 Orang
3	Golongan IV	1 Orang
4	Non PNS	28 Orang

Sumber: Subag kepeg DPPKB Boven Digoel

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP DPPKB Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021 adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- 5) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
- 7) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- 8) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92 Tahun 2011 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga berencana;
- 9) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

1.4. Harapan dan Tantangan

Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel yang tertuang didalam Renstra 2016-2021, bahwa akan menjadi Lembaga yang handal dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas menuju Boven Digoel Mandiri Sejahtera dan Mampu Berdaya saing maka peluang untuk semakin maju dan berkembang terbuka lebar. Hal ini ditunjang oleh dukungan regulasi dan meningkatnya komitmen Presiden, yang tertuang dalam Nawa Cita, terutama terkait Pembangunan Sumber Daya Manusia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan wajib dan merupakan urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau urusan konkuren.

Sebagaimana ditetapkan pada pasal 12 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Penyelenggaraan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB termasuk Urusan Pemerintahan Wajib namun yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam lampiran huruf N, tentang pembagian urusan pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten dan kota, urusan pengelolaan PLKB/PKB menjadi kewenangan pusat. Kewenangan ini dimaknai sebagai modal utama untuk penggerakan lini lapangan dan penataan kembali tenaga PLKB/PKB, yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Selain kejelasan dalam penanganan PLKB/PKB, urusan sertifikasi PLKB/PKB, standarisasi pelayanan KB dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi, dalam lampiran Undang-undang tersebut menjadi kewenangan Pusat, namun masih belum terlaksana secara maksimal termasuk urusan PLKB saat inipun sudah menjadi urusan Daerah/ kabupaten karena PLKB sudah di angkat statusnya menjadi Aparatur sipil negara.

Prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan langkah konkrit untuk mengatasi rentang kendali manajemen pelayanan program KB antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten dan Kota. Hal ini tentunya dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan pengendalian penduduk dan KB kepada masyarakat, yang diindikasikan dengan adanya keberpihakan ketersediaan infrastruktur, instrumen regulasi yang mendukung penyelenggaraan program, penempatan personil Tenaga Penyuluh dan Pelayanan KB, Jika seluruh hal tersebut dapat disinkronkan secara harmonis, maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan program akan semakin baik dan berkualitas.

Selanjutnya, terkait dengan integrasi penduduk dengan pembangunan diperlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Secara garis besar, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan, penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan, dimana pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan untuk penduduk. Selain itu pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pembangunan sumber daya manusia, dimana pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata.

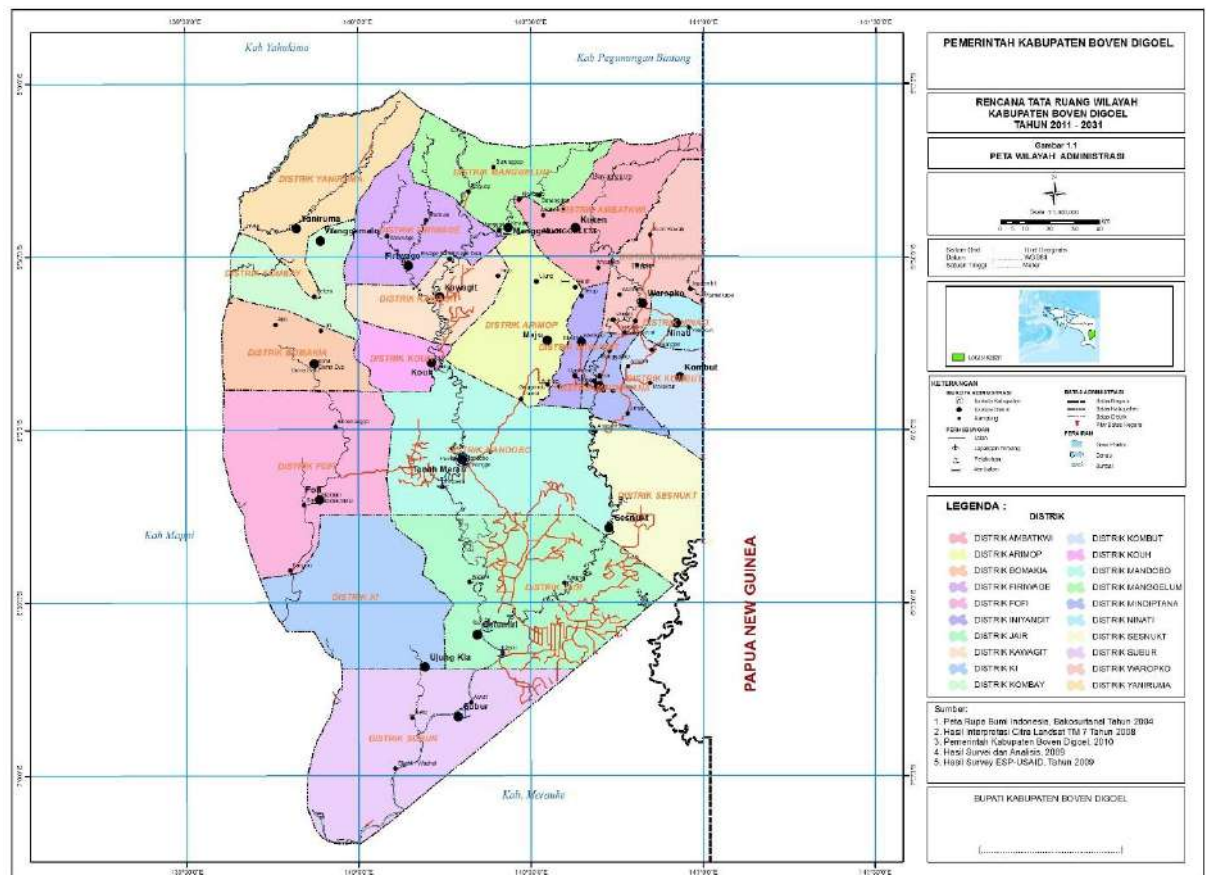
Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel, turut memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, dan mengarahkan persebaran penduduk. Pembangunan kependudukan juga merupakan upaya untuk mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA) dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan

jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Khusus di Boven Digoel terdapat 20 Distrik dan 112 kampung

Gambar: 1.2
Peta kabupaten boven digoel



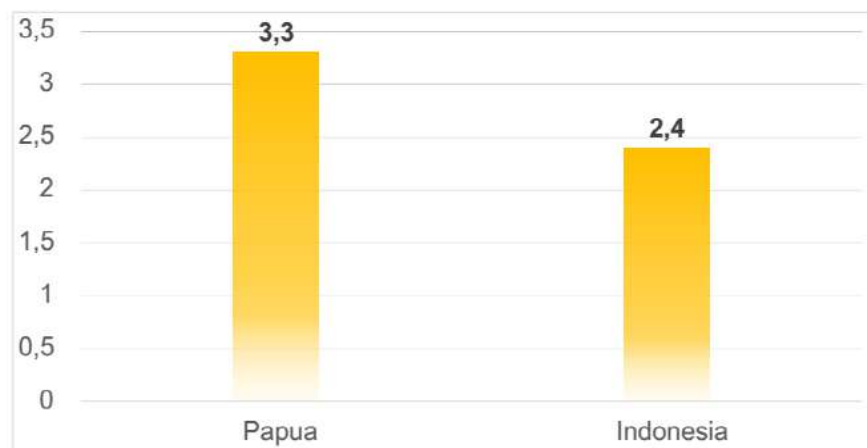
Dengan memperhatikan 20 distrik dan 112 kampung tersebut, maka DPPKB Kabupaten Boven Digoel dalam melaksanakan program BANGGA KENCANA melalui pendekatan Koordinasi dan kearifan lokal, dapat bekerjasama bersama perangkat organisasi lainnya sehingga tidak terjadi benturan dalam pelaksanaan program BANGGA KENCANA (kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga) .

Di bawah ini adalah secara luas kondisi demografi di Papua yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan Program BANGGA KENCANA oleh semua OPD DPPKB se Provinsi Papua:

1. Angka TFR menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Data hasil survei demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 menunjukkan bahwa tingkat kelahiran total di Provinsi Papua tahun 2017 adalah 3,3. Walaupun telah mengalami penurunan dari SDKI 2017 (3,5), angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan TFR rata-rata nasional, yaitu 2,4.

Gambar: 1.3.

Tren Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi Papua



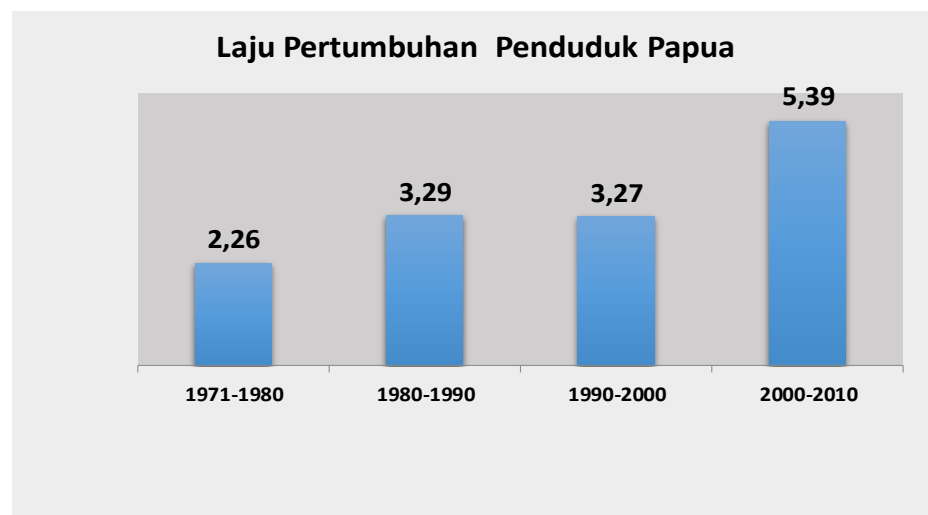
Gambar 4. Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi Papua

Sumber : SDKI 2017

Gambar: 1.4.

Laju Pertumbuhan Penduduk Papua

Hasil SPI 1980 - 2010

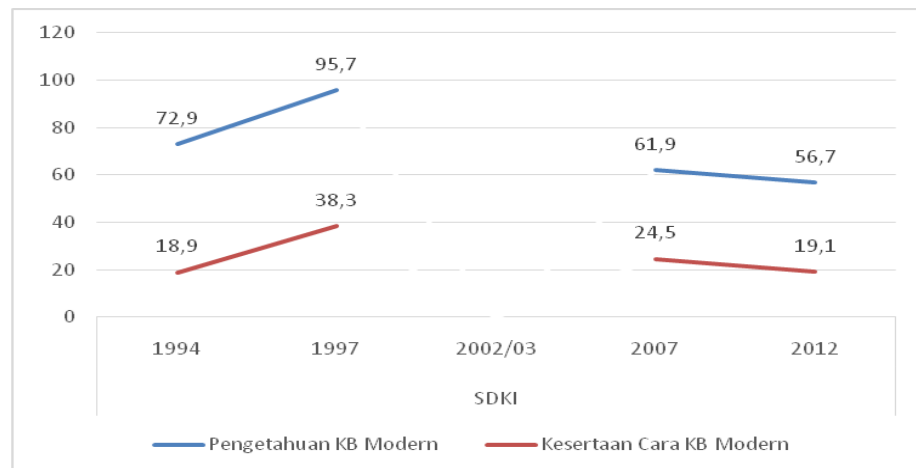


SUMBER: BPS PAPUA-SP 1980-2010

2. Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, yang ditandai dengan hasil SDKI 2012, bahwa pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi sudah mencapai 56,7% dari PUS, namun tidak diikuti dengan perilaku untuk menjadi peserta KB (19,1%).

Gambar: 1.5.

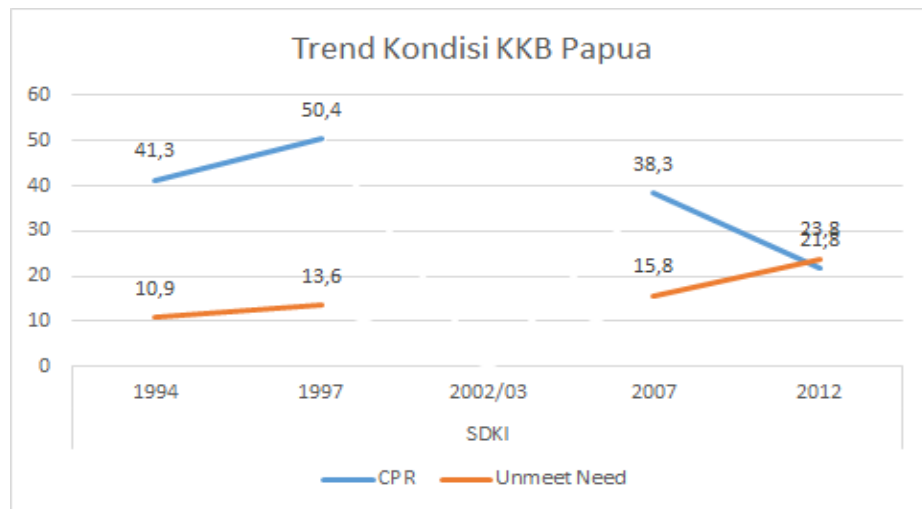
**Sandingan Tingkat Pengetahuan KB Modern dan
Kesertaan Cara KB Modern**



SUMBER: BPS

3. Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan, yaitu dari sebesar 41,3 persen pada tahun 1994 menjadi sebesar 50,4 persen pada tahun 1997, namun pada pelaksanaan SDKI tahun berikutnya mengalami penurunan, yaitu dari hasil SDKI 2007 sebesar 38,3 persen turun menjadi 23,8 persen pada hasil SDKI 2012. Sementara itu, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, yaitu sebesar 15,8 persen berdasarkan SDKI 2007 dan 21,8 persen pada SDKI 2012.

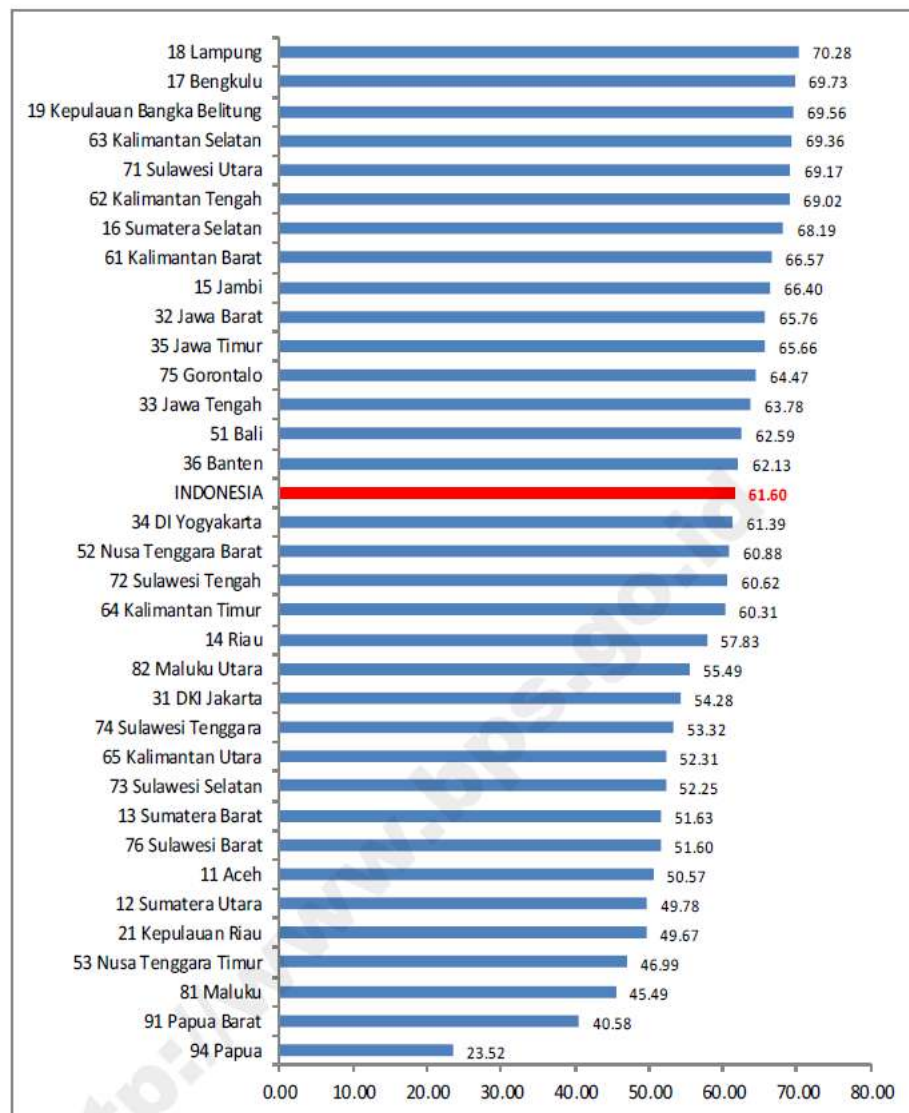
Gambar: 1.6.
Sandingan pemakain KB cara Modern dan Unmet



SUMBER: BPS

Data lain menggambarkan CPR wanita di Papua Tahun 2015 sebesar 23,52 (SUPAS 2015). Hal ini menempatkan Provinsi Papua pada posisi terendah dalam capaian CPR jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Gambar: 1.7.
CPR Wanita menurut SUPAS 2015



SUMBER: SUPAS 2015

4. Kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan.
5. Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, yaitu 48 per 1.000 kelahiran (SDKI 2012), dan

remaja perempuan 15-19 tahun yang telah menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama meningkat dari sebesar 2,2 persen menjadi sebesar 2,5 persen. Masih banyaknya perkawinan usia muda, yang ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah yaitu 19,9 tahun (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria)

Selain tantangan demografi yang telah dijabarkan di atas, keadaan serupa pun terjadi di Kabupaten-kabupaten se-provinsi Papua terlebih khusus Kabupaten Boven Digoel selanjutnya adalah beberapa hambatan / kendala yang terjadi Adapun yang menjadi kelemahan / kendala dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Belum kuatnya kompetensi SDM di jajaran OPD KB Kabupaten Boven Digoel dalam bidang Kependudukan dan Demografi baik Pengelola Program di OPD-KB maupun tenaga operasional Lini Lapangan atau Petugas Lapangan KB. Hal ini dapat dilihat dari 20 Distrik dan 112 Kampung yang memiliki Petugas Lapangan KB hanya 20 Petugas di 20 Distrik dan juga dipengaruhi transportasi yang masih sangat relatif tinggi tingkat kesulitannya (Jalur Sungai kadang mengalami pasang surut sehingga menyulitkan untuk menjangkau distrik atau kampung - Kampung, dan jalur darat yang masih ada jalan tanah sehingga ketika hujan Transportasi darat terhambat karena kondisi jalan menjadi berlumpur) sehingga untuk menjangkau kampung-kampung di wilayah kerja Kabupaten Boven Digoel menjadi sangat sulit.
2. Sarana dan prasarana operasional pendukung, Balai Penyuluh, Rumah PLKB, media Penyuluh dan metode untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang kurang memadai. Seperti Pembangunan Balai Penyuluh dan Rumah PLKB yang kurang jumlahnya, pengadaan IT tidak semua berada di distrik, kalau pun ada hanya tersedia pada ibu kota distriknya saja, begitupun dengan pengadaan LCD Proyektor /infocus 5 unit tapi

tidak bisa digunakan karena listrik di beberapa kampung belum ada.

3. Fluktuasi tenaga yang ada di OPD DPPKB, sehingga sangat berpengaruh terhadap kesinambungan informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Seperti belum termutasinya Staf ASN, Honda dan PLKB secara merata dan ketersediaan petugas penanggung jawab pengelola program BANGGA KENCANA yang masih kurang.
4. Nakes khususnya tenaga Bidan yang menjadi Mitra OPD DPPKB di Puskesmas belum tersebar merata di Kampung Kampung / Distrik
5. Kepala Kampung merupakan mitra Penting DPPKB dalam mengsucceskan Program BANGGA KENCANA, tapi masih banyak Kepala Kampung yang belum memahami program tersebut sehingga menghambat jalannya kegiatan yang di laksanakan DPPKB. salah satunya SDM yang masih rendah dan di pengaruhi faktor Pendidikan.

Dari berbagai permasalahan pencapaian demografi dan KB serta permasalahan komitmen/ dukungan pemerintah daerah di atas memberikan gambaran dan pelajaran berharga bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Boven Digoel untuk meningkatkan dukungan dan komitmen stakeholders di semua Distrik dan kampung, penguatan kelembagaan dan SDM program BANGGA KENCANA, Peningkatan Koordinasi dan Komitmen antar sektor, terutama di kabupaten, distrik dan Kampung. Berbagai kalangan terutama para pengambil Kebijakan, perlu diyakinkan bahwa program BANGGA KENCANA merupakan program strategis pembangunan bangsa, yang berdampak ganda: (a) menyehatkan ibu, anak, keluarga dan masyarakat; dan (b) menjamin keberlanjutan pembangunan melalui penyeimbangan penduduk dengan pembangunan dan lingkungan, yang berujung pada Pembangunan Berwawasan Kependudukan.

Beberapa harapan dan tantangan strategis yang dapat digunakan sebagai peluang untuk memajukan program KKB ke depan adalah:

1. Komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program BANGGA KENCANA di Daerah, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran, sesuai dengan amanat Undang-undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, tentang pembentukan Kelembagaan KKB di Kabupaten.
2. Nomenklatur Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terbentuk di Kabupaten dengan Type bervariasi ada yang A, B, C bahkan Merger sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. Ditambah lagi penegasan kembali bahwa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah, serta urusan pengelolaan PLKB/PKB; penyediaan alat kontrasepsi; sertifikasi PLKB/PKB dan standarisasi pelayanan KB sebagai urusan pemerintah pusat; akan meningkatkan sinergitas pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam penanganan urusan pengendalian penduduk dan KB.
3. Pemanfaatan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintahan desa dalam mensinergikan dan mensukseskan program BANGGA KENCANA, Peningkatan anggaran desa oleh pemerintah melalui APBN menjadi peluang untuk meningkatkan dinamika program BANGGA KENCANA sampai di level lini lapangan (dusun/kampung, RW, RT).
4. Ketersediaan Perda (Peraturan daerah) kampung KB pada dinas pengendalian penduduk dan KB sehingga kolaborasi tiap organisasi perangkat di kabupaten dapat tercipta dengan baik.

5. **Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tidak bisa digabungkan/dileburkan ke dinas lain, karena banyak pembiayaan program strategis BANGGA KENCANA yang berasal dari APBN/DAK.**

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan sebagai upaya mewujudkan visi, misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Boven Digoel, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tetap mengacu kepada Rencana Strategis Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2021 – 2025.



2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. VISI, MISI DAN TUJUAN

a. Visi

Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan dan bersifat praktis, realistis untuk dicapai, memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Boven Digoel, Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Boven Digoel sesuai yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2025 adalah menjadi “ **LEMBAGA YANG HANDAL DALAM MEWUJUDKAN PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG SERTA KELUARGA BERKUALITAS MENUJU BOVEN DIGOEL , BERSATU , SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING** ” Visi tersebut merupakan salah satu dari prioritas pembangunan nasional yaitu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas, Visi ini bukan hanya

bertekad mewujudkan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga tetapi juga untuk mewujudkan (DPPKB) Kabupaten Boven Digoel sebagai lembaga negara yang handal dan memperoleh kepercayaan dari berbagai mitra kerja dan stakeholder terutama kepercayaan dari publik.

b. Misi

Dalam rangka mendukung upaya perwujudan Visi Kelembagaan dan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tersebut dilakukan melalui misi:

1. Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga dan Ketahanan Keluarga
4. Membangun dan Menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara konsisten,
5. Mengembangkan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA).
6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

c. Tujuan

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: **(Pertama)** berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. **(Kedua)**, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. **(Ketiga)** adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar Wilayah, baik antar distrik maupun antara perkotaan dan kampung. **(Keempat)** adalah data dan informasi penduduk; dan **(kelima)** adalah penyerasian kebijakan kependudukan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kelembagaan dan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, serta sesuai dengan tugas / fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Boven Digoel maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Memperkuat akses pelayanan KB yang merata, berkualitas dengan pola pendekatan Kesehatan Reproduksi dan Pengaturan Jarak Kelahiran melalui program 1.000 hari pertama kehidupan.
2. Meningkatkan pembinaan Peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun non-MKJP.
3. Meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi remaja.
4. Meningkatkan komitmen stakeholder dan mitra kerja terhadap program BANGGA KENCANA.
5. Memperkuat tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang keluarga berencana.
6. Menyiapkan kualitas Sumber Daya Manusia sejak dini menuju perwujudan generasi emas Papua.

2.1.2. SASARAN STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS

a. Sasaran

Berdasarkan visi, misi dan tujuan tersebut di atas, maka Sasaran Strategis Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA) DPPKB Kabupaten Boven Digoel tahun 2021-2025 sebagai berikut:

1. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun);
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR);
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (unmet need);
4. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun);
5. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).
6. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan MKJP
7. Menurunnya kasus stunting di kampung-kampung

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut diatas maka disusun kegiatan strategis dalam pengelolaan program BANGGA KENCANA sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

BELANJA OPERASI

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

BELANJA OPERASI

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak

c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat

d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

BELANJA OPERASI

- Belanja Gaji Pokok PNS
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
- Belanja Tunjangan Beras PNS
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS
- Belanja Tunjangan Khusus
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS
- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

BELANJA OPERASI

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak

f. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

BELANJA OPERASI

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak
- Belanja Bimbingan Teknis
- Belanja Diklat Kepemimpinan
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- Belanja Perjalanan Dinas Tetap

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

BELANJA OPERASI

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – alat listrik

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

BELANJA OPERASI

- Belanja bahan – bahan Lainnya
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya

i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

BELANJA OPERASI

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – alat tulis kantor

j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

BELANJA OPERASI

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak

k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan

BELANJA OPERASI

- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

BELANJA OPERASI

- Belanja perjalanan dinas biasa

m. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

BELANJA OPERASI

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – benda pos

n. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

BELANJA OPERASI

- Belanja Natura dan Pakan – Natura
- Belanja tagihan listrik

o. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

BELANJA OPERASI

- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

p. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan

BELANJA OPERASI

- Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan
- Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor – kendaraan dinas bermotor perorangan

q. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

BELANJA OPERASI

- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

r. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendinginan
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer

2. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

BELANJA OPERASI

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – Alat Tulis Kantor
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – Benda Pos
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Honorarium Narasumber Atau Pembahas, moderator, Pembawa Acara dan Panitia
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- Belanja perjalanan dinas dalam kota

b. Pelaksanan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Kependudukan

BELANJA OPERASI

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak

c. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan

BELANJA OPERASI

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak
- Belanja makanan dan minuman rapat
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

d. Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

BELANJA OPERASI

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja perjalanan dinas dalam kota

e. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

BELANJA OPERASI

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak

f. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

- Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak
- Belanja Makanan dan minuman rapat
- Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota

3. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

a. Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

BELANJA OPERASI

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Perjalanan Dinas dalam kota

b. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal

BELANJA OPERASI

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak

c. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang

BELANJA OPERASI

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak

d. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)

BELANJA MODAL

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota

e. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

BELANJA OPERASI

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota

f. Pengendalian Program KKBPK

BELANJA OPERASI

- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

g. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB

BELANJA OPERASI

- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
- Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum

h. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

BELANJA OPERASI

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak
- Belanja makanan dan minuman rapat
- Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia
- Belanja perjalanan dinas dalam Kota

i. Pengendalian Pendistribuan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

BELANJA OPERASI

- Belanja makanan dan minuman rapat
- Belanja perjalanan dinas dalam Kota

j. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

- Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak
- Belanja Obat-Obatan-Obat
- Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat

- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
- Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota

k. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk jaringan dan jejaringnya

BELANJA OPERASI

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak
- Belanja makanan dan minuman rapat
- Belanja perjalanan dinas dalam Kota

l. Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

BELANJA OPERASI

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak
- Belanja makanan dan minuman rapat
- Belanja perjalanan dinas Biasa

m. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

BELANJA OPERASI

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak
- Belanja makanan dan minuman rapat
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- Belanja perjalanan dinas dalam kota

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)

BELANJA OPERASI

- Belanja modal alat kedokteran keluarga berencana

b. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

BELANJA OPERASI

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota

c. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)

BELANJA OPERASI

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak
- Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
- Belanja Kawat/Fasimili/Internet/TV Berlangganan
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- Belanja Perjalanan Dinas Tetap

d. Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK

BELANJA OPERASI

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak
- Belanja makanan dan minuman Aktivitas Lapangan
- Belanja perjalanan dinas biasa

2.1. PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH

Dokumen Perjanjian / Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja yang meliputi kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Pada tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel mendapat target kinerja pada sasaran dan indikator sasaran sebagai upaya pengukuran perencanaan program dan anggaran yang berbasis kinerja.

Berikut sasaran dan target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel Tahun 2022 dan Hasil Pencapaian sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Capaian 2021 dan Target Pencapaian 2022 Berdasarkan Kontrak Kerja Kepala Perangkat daerah (KKK)

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
	A. SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	1	Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-19 th)	3,66	3,29
2	Meningkatnya peserta KB baru	2	Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49th	7,93	8,72
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase tingkat ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	18,83	16,95
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	92,07	82,86
5	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang	5	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	3,60	3,96
6	Menurunnya angka kelahiran pada Remaja (ASFR 15-19th)	6	Angka kelahiran pada remaja(perempuan usia 15-19th) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	254	229

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel selaku



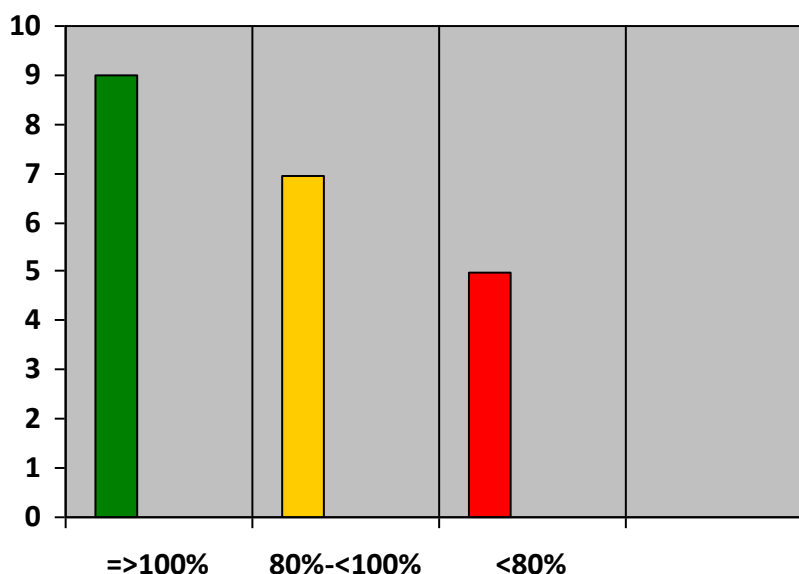
pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2025 maupun Renja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Berdasarkan Persentase



Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

TABEL 3.1
Indikator Kinerja Prioritas OPD DPPKB
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2022

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
	A. SASARAN STRATEGIS			
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	1	Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-19 th)	3,66
2	Meningkatnya Peserta KB baru	2	Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49th	10,46
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase tingkat ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	10,08
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	89,54
5	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang	5	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	3,09
6	Menurunnya angka kelahiran pada Remaja (ASFR 15-19th)	6	Angka kelahiran pada remaja(perempuan usia 15-19th) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	113
	B. INDIKATOR STRATEGI DI LUAR RENSTRA			
7	Meningkatnya Perangkat Daerah (Dinas / badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	7	Persentase Perangkat Daerah (Dinas / badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	100%

8	Meningkatnya pembiayaan program kependudukan , keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes	8	Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes	100%
9	Meningkatnya ketersediaan Peraturan Daerah Kampung KB	9	Jumlah ketersediaan Peraturan Daerah Kampung KB	100%
10	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yg akurat dan tepat waktu	10	Jumlah ketersediaan data dan informasi yg akurat dan tepat waktu	100%
11	Meningkatnya keuangan dan pengelolaan BMN yg dapat diselesaikan tepat waktu, akuntabel, kredibel, dan memenuhi standar kepatutan	11	Jumlah Laporan keuangan dan pengelolaan BMN yg dapat diselesaikan tepat waktu, akuntabel, kredibel, dan memenuhi standar kepatutan	100%
12	Terbentuknya Kampung KB	12	Persentase Pembentukan Kampung KB	100%
13	Menurunnya kasus stunting	13	Jumlah Kunjungan Kampung	10/112 Kampung

Sumber data : DPPKB tidak memiliki IKU dalam RPJMD yang dipakai hanya sasaran strategis dan kegiatan strategis. (DPPKB lahir Thn 2017)

3.2 UPAYA PROGRAM, KEGIATAN DAN HASIL PENCAPAIAN

3.2.1 Pengukuran Kinerja Untuk Pengendalian dan Pemantauan Kinerja

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Boven Digoel, dalam pengendalian dan pemantauan kinerja, disinergikan dengan pencapaian Kontrak Kinerja Kabupaten (KKK). Pengendalian dan pemantauan kinerja tersebut dilakukan melalui 3 tahap yaitu bulanan, semesteran dan tahunan. Evaluasi kinerja bulanan dilakukan melalui rapat pengendalian program dan anggaran (RADALGRAM), yang dilaksanakan rutin setiap bulan. RADALGRAM dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Boven Digoel. Hal itu menunjukkan komitmen pimpinan dan anggota organisasi untuk mengendalikan pencapaian kinerja program dan organisasi. Dalam RADALGRAM selain dibahas permasalahan-permasalahan program juga dibicarakan strategi dan upaya pemecahan masalahnya serta rencana tindak lanjutnya.

3.2.2 Mekanisme pengumpulan data pencapaian kinerja

Terdapat berbagai sumber data untuk mengukur pencapaian kinerja Program BANGGA KENCANA di DPPKB Kabupaten Boven Digoel Tahun 2022. Sumber data tersebut adalah Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program BANGGA KENCANA dari PLKB juga Mitra kerja,

Sistem pencatatan dan pelaporan program BANGGA KENCANA Kabupaten (mekanisme dan alur pelaporan terlampir) terdiri dari pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi (F/II/KB), pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan (F/II/DALLAP), dan pendataan keluarga (R/II/KS dan F/II/MDK). Pencatatan dan pelaporan Pelayanan Kontrasepsi, melalui F/II/KB, dikumpulkan secara berjenjang setiap bulan mulai dari klinik KB yang berada di tingkat kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan pusat. Dalam formulir F/II/KB terekam data antara lain jumlah peserta KB baru (per metode kontrasepsi), data kegagalan dan komplikasi serta persediaan alat dan obat kontrasepsi. F/II/KB merupakan sumber data untuk mengukur pencapaian kinerja indikator-indikator (a) Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru, (b) Jumlah Peserta KB Baru mandiri, (c) Persentase Jumlah Peserta KB Baru MKJP, (d) Persentase Peserta KB baru pria, (e) Jumlah Peserta KB baru KPS dan KS I.

Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan, dengan menggunakan formulir F/II/Dallap dikumpulkan bulanan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan pusat. Dalam formulir F/II/Dallap terekam data antara lain peserta KB aktif, ganti cara, kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan KPS dan KS-I. F/II/Dallap merupakan sumber data untuk mengukur pencapaian kinerja indikator-indikator (a) Jumlah Peserta KB aktif, (b) Jumlah Peserta KB aktif KPS dan KS I, (c) Persentase Peserta aktif mandiri, dan (d) Persentase Peserta KB aktif MKJP.

3.2.3 Upaya dan Kegiatan Strategis Program BANGGA KENCANA

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, upaya program dan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2022 secara umum adalah melakukan konsolidasi dan penyegaran kembali komitmen terhadap program BANGGA KENCANA nasional kepada seluruh penyelenggara negara, stakeholder terkait, dan mitra kerja program. Secara khusus, upaya program yang dilakukan adalah dengan merancang, menyusun, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis Program KKB Nasional 2015-2019 dan juga Renstra Kabupaten 2021-2025.

Upaya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut bertujuan untuk pemantapan kelangsungan program dan kelembagaan, peningkatan kinerja program di setiap tingkatan wilayah, serta pemenuhan permintaan masyarakat akan pelayanan keluarga berencana yang menyeluruh dan bermutu dalam rangka membantu terwujudnya keluarga kecil berkualitas. Gambaran pelaksanaan kinerja program KKB nasional yang merupakan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2011 meliputi empat program pokok, yaitu (1) Program Kependudukan dan KB; (2) Program Pelatihan dan Pengembangan; (3) Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya; serta (4) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan program BANGGA KENCANA , maka pada setiap awal tahun selalu dilakukan penyegaran kembali komitmen terhadap program BANGGA KENCANA Kabupaten dari para penyelenggara daerah, stakeholder, pimpinan OPD dan mitra kerja program melalui forum-forum yang berskala regional, yaitu Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, dan Rapat Koordinasi Teknis.

Melalui forum-forum pertemuan tersebut dilakukan sosialisasi dan desiminasi visi, misi, kebijakan, strategi, dan pokok-pokok program serta kegiatan dalam Rencana Strategis Program KKB

Kabupaten tahun 2021-2025 dan disinkronkan dengan rencana aksi dan operasionalisasi kegiatan prioritas.

Untuk mencapai target yang tercantum dalam RK OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Boven Digoel pada Tahun 2022, telah melaksanakan 4 (Empat) program dengan 39 Sub-Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk meningkatkan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 antara lain :

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan menyediakan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan menghasilkan 4 Dokumen (RENJA, RKA SKPD, LAKIP, & RENSTRA).

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan menghasilkan 1 Laporan Dokumen

1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk Mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA di lingkungan DPPKB pada Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan

Menghasilkan 1 Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Pertriwulan.

1.4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan sebanyak 29 orang.

1.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan menghasilkan 1 laporan dokumen.

1.6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Kegiatan tidak terlaksana karena pegawai yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan PIM IV sedang berhalangan atau tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut.

1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penggunaan komponen instalasi listrik/penerangan sebanyak 3 jenis dalam Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB meliputi:

- Kabel Listrik
- Lampu SL 23 Watt (setara Panasonic)
- Lampu Philips Tornado 24 watt

1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan sebanyak 5 jenis:

- Bahan pembersih botol 450 ml
- Bahan pembersih botol 500 ml
- Bahan pembersih refil 800 ml
- Obat Nyamuk Vape Semprot 750 ML
- Tissue paseo refil 280 sheet

1.9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penggunaan Bahan logistik kantor sebanyak 2 jenis Bahan dalam Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB Seperti:

1. Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas meliputi:
 - Premium/Bensi (Industri)
 - Solar (Industri)
2. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Meliputi:
 - Tinta/Toner Printer-Epzon Black
 - Amplop Coklat Folio
 - Amplop Putih Royal 110
 - Binder Clip Joyco/Kenk 155
 - Binder Clip Joyco/Kenko 260
 - Binder Clip Joyco/Kenko 105
 - Binder Clip Joyco/Kenko 107
 - Buku Agenda Tim Besar
 - Buku Agenda Tim Kecil
 - Buku Ekspedisi Bo
 - Buku Kas Folio Bm

- Buku Kwitansi Sinar Dunia Besar
- Buku Kwitansi Sinar Dunia Kecil
- Buku Memo Paperline A5 isi 20 lbr
- Buku Note Paperline B2
- Buku Tulis Aa 100 Lembar
- Cutter Joyco A-300
- Cutter Joyco L-500
- File Box Bindex Jumbo
- File Box Maspion Keranjang
- Gunting Kenko Besar 848N
- Isi Cutter Joyco L-150
- Isi Staples Max 10
- Isi Staples Max 3
- Kertas FC Sinar Dunia A4 70 gr
- Kertas FC Sinar Dunia F4 60 gr
- Map Karton Biola 5001
- Map Plastik Seagul Snelhekte
- Papan Movieboard Gantung 40 x 60
- Pembatas Kertas Bantex 6240
- Penggaris Plastik Butterfly 50 CM
- Penghapus Pensil Steadler Kecil
- Pensil Steadler 2B
- Plakban Bening Daimaru 2
- Plakban Coklat Daimaru 2
- Plakban Hitam Daimaru 1.5
- Pulpen Snowman V5
- Pulpen Boxy Marking Hitam
- Serutan Kenko Besar
- Spidol Snowman Whiteboard
- Stabilo Boss
- Tinta/Toner Printer-Epzon Magenta
- Tinta/Toner Printer-Epzon Yellow

- Tipex/Correction Pen-Tipex Artline

1.20 *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan jumlah dokumen yang dicetak sebanyak 25.292 lembar dan jumlah dokumen yang digandakan sebanyak 500 Eksemplar.

1.21 *Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan*

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sebanyak 12 bulan meliputi:

- Belanja Langganan Koran Papua Selatan POS

1.22 *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB maka sebanyak 11 kali dalam satu tahun melakukan perjalanan dinas dengan tujuan Jakarta dan jayapura dan staf yang melakukan perjalanan berbeda beda sesuai dengan Undangan ataupun Radio gram kegiatan.

1.23 *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB dengan menyediakan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, jumlah materai yang disediakan sebanyak 600 lembar.

1.24 *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung

Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB dengan jumlah listrik yang disediakan sebanyak 8000 Kwh dan jumlah sumber daya air yang disediakan sebanyak 200 galon.

1.25 *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB dengan jumlah Pegawai Staf Honor dan PLKB sebanyak 28

1.26 *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB dengan Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Sebanyak 1 Unit, dan kendaraan dinas Roda 4 Sekretaris yang diperbaiki 1 unit.

1.27 *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB dengan Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 Sebanyak 9 Unit, Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Operasional atau Lapangan Sebanyak 1 Unit, kendaraan dinas Roda 2 yang diperbaiki 9 unit dan kendaraan dinas Roda 4 Operasional Atau Lapangan yang diperbaiki 1 unit.

1.28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB dengan jumlah AC yang di perbaiki 5 Unit, Computer yang di perbaiki 4 Unit, laptop yang di perbaiki 7 unit dan printer yang di perbaiki 5 unit.

2. Program Pengendalian Penduduk

2.1 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB dengan Mendatangkan Tim dari UNCEN sebanyak 6 Orang dan menyusun data yang dibuat dalam 1 buku GDPK Kabupaten Boven Digoel.

2.2 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada kegiatan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan dengan ini belum di realisasikan.

2.3 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan dengan Jumlah Pengelola Keuangan BOKB yang mendapatkan Honorarium sebanyak 3 orang selama 12 Bulan, Melakukan Kunjungan dinas ke Distrik Jair Kampung Naga dan Distrik Kouh Kampung Kouh, dan Dukungan Siga (Paket Data Komunikasi di Balai Penyuluh) tidak terealisasi.

2.4 *Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga*

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan Jumlah Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebanyak 1 dokumen dan kunjungan dinas ke distrik sebanyak 3 distrik.

2.5 *Penyediaan Data dan Informasi Keluarga*

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga dengan jumlah Dokumen sebanyak 1 Dokumen.

2.6 *Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga*

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga dengan melakukan pengumpulan data Keluarga ke 4 Distrik.

3. *Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)*

3.1 *Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja*

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja dengan jumlah Stake Holders dan Mitra Kerja yang mengikuti kegiatan sebanyak 1 Faskes.

3.2 *Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal*

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan jumlah media KIE sebanyak 4 Item, terdiri dari:

- a. Cetak Roll Up Banner 13 Buah
- b. Leaflet 200 Lembar
- c. Poster 50 Lembar
- d. Spanduk 20 Buah

3.3 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruangan

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruangan dengan jumlah media KIE sebanyak 4 Item, terdiri dari:

- a. Cetak Roll Up Banner 22 Buah
- b. Leaflet 64 Lembar
- c. Poster 305 Lembar
- d. Spanduk 70 Buah

3.4 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan jumlah rapat koordinasi tingkat distrik sebanyak 20 distrik.

3.5 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dengan jumlah operasional balai penyuluh KB kecamatan yang disediakan sebanyak 4 Kegiatan, seperti Kegiatan Operasional Pembinaan Kader, Kegiatan Operasional Pengolahan Data, Kegiatan Operasional Penyuluhan KB, dan Kegiatan Orientasi tenaga lini lapangan di balai penyuluh KB.

3.6 Pengendalian Program KKBPK

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada Kegiatan Pengendalian Program KKBPK dengan jumlah Lokus Stunting yang di audit sebanyak 2 kali Kegiatan

3.7 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB dengan jumlah balai penyuluh KB yang dibangun sebanyak 1 balai penyuluh KB di Kampung Autriop Distrik Iniyandit.

3.8 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 896 peserta

3.9 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan memberikan uang pengganti Transportasi Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi kepada 46 orang.

3.10 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan jumlah kegiatan sebanyak 3. Seperti kegiatan pemasangan IUD, Pemasangan Implant, dan Pencabutan Implant.

3.11 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2021 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan melakukan 2 kegiatan seperti Kegiatan koordinasi pelayanan di faskes KB dan kegiatan pembinaan pelayanan di faskes KB.

3.12 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan

Dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan Jumlah Peserta mitra kerja yang di berdayakan sebanyak Jumlah Peserta mitra kerja yang di berdayakan sebanyak 375 orang di 3 Distrik

3.13 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2022 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada Kegiatan Penguatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan Jumlah kampung KB yang di berdayakan sebanyak 20 Kampung KB.

4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

4.1 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Untuk meningkatkan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana yang dapat di pergunakan sebagaimana mestinya dengan jumlah BKB KIT Stunting sebanyak 5 set dan KIT Siap Nikah Anti Stunting sebanyak 2 set.

4.2 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkat Orientasi dan Pelatihan Pengelolaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan Jumlah Kader Tim Pendamping Keluarga (Bidan, Kader KB dan Kader PKK) dalam Percepatan penurunan Stunting sebanyak 336 orang.

4.3 Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Kegiatan ini bertujuan untuk Penyediaan biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) seperti biaya Operasional Pendampingan Pasca Bersalin di Desa, Biaya Operasional Pendampingan Calon Pengantin di Desa, dan Biaya Operasional Petugas Pendampingan Ibu Hamil di Desa

4.4 Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2021 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pada kegiatan Penyediaan dan Pengembangan materi IPK dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 180 Peserta.

Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
(LAKIP) Dinas
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Tahun 2022



adalah bentuk perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta akuntabilitas kinerja maupun anggaran dari DPPKB telah disusun secara sistematis sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .LAKIP DPPKB Tahun 2022 menyajikan berbagai informasi penting terkait capaian keberhasilan target Visi dan Misi DPPKB berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2025 dan Rencana Aksi Upaya Pencapaian Target/Sasaran RPJMD dan Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019. Dalam dokumen ini dapat dilihat capaian indikator program dan indikator strategis yang ditargetkan pada Tahun 2022.

Laporan kinerja ini juga dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dalam arti luas serta sebagai media pertanggungjawaban melalui penyelenggaraan program dan kegiatan yang terlebih dahulu dirumuskan dan ditetapkan melalui proses yang terarah bahkan teruji atau terukur secara jelas baik atas penyelenggaraan maupun hasil akhirnya. Laporan ini memberikan gambaran

atas segala daya dan upaya DPPKB dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi termasuk pula hambatan dan tantangan.

4.1. PENGUKURAN KINERJA

1. Capaian Kinerja DPPKB Tahun 2022 yang masuk dalam kategori BAIK {HIJAU} dengan rentang pencapaian $\geq 100\%$ adalah
 - a. Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes
 - b. Jumlah ketersediaan Peraturan Daerah Kampung KB
 - c. Jumlah ketersediaan data dan informasi yg akurat dan tepat waktu
 - d. Jumlah Laporan keuangan dan pengelolaan BMN yg dapat diselesaikan tepat waktu, akuntabel, kredibel, dan memenuhi standar kepatutan
 - e. Persentase Pembentukan Kampung KB
2. Capaian Kinerja DPPKB Tahun 2022 yang masuk dalam kategori CUKUP {KUNING} dengan rentang pencapaian antara 80% s.d. 99 % adalah
 - a. Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-19 th)
 - b. Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49th
 - c. Persentase tingkat ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi
 - d. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)
 - e. Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
 - f. Jumlah Alat kontrasepsi yang tersedia di Faskes
 - g. Jumlah Peserta KB Aktif
3. Capaian Kinerja DPPKB Tahun 2022 yang masuk dalam kategori KURANG {MERAH} dengan rentang pencapaian di bawah 80% adalah :
 - a. Jumlah stunting di kampung masih belum optimal

- b Persentase Perangkat Daerah (Dinas / badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB

4.2. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Boven Digoel menjadi pendorong penyusunan strategi yang tepat sasaran. Dengan kondisi demografi Kabupaten Boven Digoel saat ini diperlukan respon cepat ataupun

pemantapan strategi penerapan program untuk bisa meningkatkan capaian dari indikator program maupun indikator capaian. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di pengendalian penduduk yang diemban oleh DPPKB , perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan DPPKB sehingga dapat lebih efektif, melalui:
 - a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur pengelola program;
 - b. Meningkatkan kualitas pelaporan, pendataan dan analisa untuk mendukung kualitas perencanaan program BANGGA KENCANA;
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan mitra kerja dalam pelaksanaan Program BANGGA KENCANA di lapangan.
 - d. Berkoordinasi lintas perangkat daerah BKD dan PSDM untuk pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara (PLKB).
2. Pemanfaatan data kependudukan yang bersumber dari Dinas Dukcapil, dan BPS, Pelaporan, Pendataan Keluarga maupun yang bersumber dari data sektoral (dinkes) sebagai acuan penyusunan pemantapan strategi pelaksanaan program,
3. Melakukan KIE yang lebih komprehensif dan yang lebih mendarat kepada masyarakat sehingga dapat dipahami sesuai kondisi dan kearifan lokal,
4. Meningkatkan advokasi dan KIE kepada para pemangku kepentingan, TOGA, TODAT, TOMAS di masing-masing tingkatan,

5. Meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap program BANGGA KENCANA,
6. Meningkatkan pelayanan KB mobile di wilayah-wilayah DTPK, serta peningkatan advokasi untuk pelaksanaan NSPK dan SPM data pengelola program KB bagi OPD-DPPKB

DOKUMENTASI
KEGIATAN GDPK (GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN)
TAHUN 2022



DOKUMENTASI
KEGIATAN GDPK (GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN)
TAHUN 2022



DOKUMENTASI
KEGIATAN GDPK (GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN)
TAHUN 2022



DOKUMENTASI
PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA
TAHUN 2022



DOKUMENTASI
PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA
TAHUN 2022



DOKUMENTASI
PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA
TAHUN 2022



DOKUMENTASI PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA TAHUN 2022



DOKUMENTASI
KEGIATAN PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA
TAHUN 2022



DOKUMENTASI
KEGIATAN PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA
TAHUN 2022



DOKUMENTASI
KEGIATAN PENYEDIAAN DAN DATA PENGOLAHAN DATA
KEPENDUDUKAN TAHUN 2022



DOKUMENTASI
KEGIATAN PENYEDIAAN DAN DATA PENGOLAHAN DATA
KEPENDUDUKAN TAHUN 2022



DOKUMENTASI
KEGIATAN PENYEDIAAN DAN DATA PENGOLAHAN DATA
KEPENDUDUKAN TAHUN 2022

































































